

BAB IV

TUNTUTAN DAN DUKUNGAN DIBALIK IJIN OPERASIONAL PERBANKAN ISLAM DI UNITED KINGDOM

Meninjau dinamika perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom seperti yang telah dijelaskan diatas, United Kingdom sepertinya telah mengalami dinamika dengan lonjakan yang cukup signifikan sebagai efek dari beroperasinya Perbankan Islam di dalamnya. Dalam bab ini, penulis akan mencoba mengerucutkan pembahasan terkait munculnya keputusan perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom – yang dalam hal ini dilambangkan dengan berdirinya IBB sebagai Perbankan Islam pertama di United Kingdom yang bersistem syariah secara menyeluruh dan menyediakan pelayanan Perbankan Islam secara lengkap – melalui analisis *decision making process*.

Melalui analisis *decision making process*, penulis akan mengurai *input* dibalik keluarnya keputusan untuk mengijinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom menjadi dua, faktor tuntutan internal dan dukungan, yang mana akan dipilah lagi sebagai berikut :

A. Desakan Masyarakat Muslim sebagai tuntutan utama bagi diijinkannya operasional Perbankan Islam di United Kingdom

Tuntutan menurut Easton dapat berasal dari situasi-situasi yang terjadi dalam suatu sistem politik. Umumnya, tuntutan yang berasal dari situasi-situasi yang terjadi dalam suatu sistem politik timbul karena norma – norma yang

melingkupi anggota-anggota suatu sistem politik belum tereksekusi secara menyeluruh, berat sebelah, menjumpai hambatan dan sebagainya. Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh penulis, tuntutan utama yang menjadi input bagi keluarnya keputusan untuk mengizinkan operasional Perbankan Islam di United Kingdom adalah desakan Masyarakat Muslim.

Menurut Easton, sebuah tuntutan baru dapat menjadi *input* bagi sebuah Sistem Politik jika tuntutan tersebut telah bertransformasi menjadi sebuah isu. Sebuah tuntutan yang timbul tidak dapat secara tiba-tiba menjadi sebuah isu politik. Terdapat beberapa indikator yang membedakan antara tuntutan yang belum menjadi isu politik dan telah menjadi isu politik, yaitu : jumlah inisiator tuntutan yang mempunyai kekuasaan dalam masyarakat; waktu pengajuan tuntutan; keahlian politik inisiator tuntutan; akses saluran komunikasi; dll.¹ Berdasarkan indikator tersebut, terdapat setidaknya 3 faktor yang menyebabkan desakan Masyarakat Muslim dapat berkembang menjadi sebuah isu yang didengar oleh Sistem Politik, yaitu : Pengaruh jumlah populasi Masyarakat Muslim, fenomena *self exclusion* dan lobi *Muslim council of Britain* terhadap badan pemerintahan.

1. Pengaruh jumlah populasi Masyarakat Muslim terhadap pemenuhan hak-hak Masyarakat Muslim di United Kingdom

Masyarakat Muslim di United Kingdom merupakan sebuah bagian dari sistem politik dengan pengaruh yang cukup kuat, khususnya dalam memberi

¹ Easton, David (1957) dalam Macridis, Roy C. Brown, Bernard E. (1996). *Perbandingan Politik*. Gelora Aksara Pratama. Hal 41-42

pengaruh bagi isu – isu yang berkaitan dengan Islam. Hingga akhir tahun 2011, populasi umat muslim tercatat sebagai 4,8% dari seluruh populasi di United Kingdom dengan 2,706,066 orang, meningkat hingga hampir dua kali lipat dari jumlah pada saat sensus pertama tahun 2001. Jumlah tersebut menjadikan Umat Muslim sebagai populasi terbanyak keempat di United Kingdom setelah Umat Kristiani (33,243, 175), *atheis* (14,097,229) dan ‘tidak menyebutkan agamanya’ (4,038,,032)². Dengan jumlah dan tingkat pertumbuhan yang signifikan tersebut, Umat Muslim merupakan sebuah bagian dari masyarakat yang mempunyai kekuatan dan peran besar jika dapat diorganisir.

Agama	Populasi Total	%
Kristen	33,243,175	59.3
Muslim	2,706,066	4.8
Hindu	816,633	1.5
Sikh	423,158	0.8
Yahudi	263,346	0.5
Budha	247,743	0.4
Agama Lain	240,530	0.4
Tidak Beragama	14,097,229	25.1
Tidak menyertakan agama	4,038,032	7.2
Jumlah	56,075,912	100

**Tabel 1 Jumlah Populasi di United Kingdom Berdasarkan Agama
Sumber : MCB Sensus Report 2015**

² Muslim Council of Britain’s Research & Documentation Committee (2015). *British Muslim in Numbers*. London, The Muslim Council of Britain.

Fakta terkait jumlah populasi Masyarakat Muslim yang besar ini dan tingkat pertumbuhannya yang fenomenal memicu perdebatan dan diskusi soal hak-hak minoritas kelompok tersebut seperti halnya hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, hak untuk berkerja atau bersekolah dan pastinya hak untuk mendapatkan layanan finansial. Banyak golongan seperti Partai-partai politik dan *Interest Group* telah membahas masalah ini dan setuju bahwasanya Pemerintah memang seharusnya menyiapkan langkah-langkah kebijakan untuk mengakomodir hak-hak Masyarakat Muslim, termasuk hak mendapat layanan finansial yang sesuai dengan kepercayaan mereka, sebagai anggota dari Sistem Politik.

Pada dasarnya, jumlah populasi Masyarakat Muslim di United Kingdom dan tingkat pertumbuhannya yang pesat mempunyai konsekuensi yang besar terhadap perkembangan Perbankan Islam di United Kingdom karena dengan jumlah yang semakin besar, Masyarakat Muslim di United Kingdom mempunyai pengaruh ekonomi dan politik yang juga semakin besar sebagai sebuah kesatuan kelompok. Peningkatan jumlah dan pengaruh ini, disisi lain, dapat menuai perhatian lebih dari banyak institusi termasuk institusi pemerintahan, partai politik, perusahaan maupun institusi perbankan. Dengan begitu, Masyarakat Muslim sebagai sebuah kesatuan kelompok mempunyai jangkauan yang lebih luas dan kesempatan yang lebih besar untuk mengartikulasikan kepentingannya, terlebih terkait masalah kepercayaan

seperti ijin pembangunan masjid, regulasi makanan *halal*, dan tentu saja, pendirian layanan Perbankan Islam.³

Dalam sektor politik, Masyarakat Muslim di United Kingdom pada awal keterlibatannya memiliki afiliasi yang kuat dengan Partai Buruh karena mereka percaya bahwa Partai Buruh adalah pro pekerja dan tidak rasis dibandingkan partai lainnya, khususnya Partai Konservatif⁴. Terlepas dari dinamika kegagalan Partai Buruh dalam pemilihan dan dalam mendukung kepentingan Masyarakat Muslim, hingga akhir tahun 1990an 90% keanggotaan politik Masyarakat Muslim masih berada di pihak Partai Buruh⁵.

Hal tersebut menunjukkan bukti lain dari kekuatan *bargaining position* Masyarakat Muslim yang bersumber dari jumlah keanggotaannya didalam Partai buruh, mengingat bahwa tahun diijinkannya operasional Perbankan Islam (dalam kasus ini, *Islamic Bank of Britain*) adalah didalam masa kepemimpinan Tony Blair dari Partai Buruh.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Jumlah populasi Masyarakat Muslim di united Kingdom beserta tingkat pertumbuhannya dan keterlibatannya dalam berbagai aspek mempunyai andil yang besar bagi transformasi kepentingan Masyarakat Muslim di united Kingdom menjadi sebuah isu yang dipertimbangkan oleh Sistem Politik.

³ Chase, Anthony (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France*. Thesis, The Department of Political Science, University of Michigan – Ann Harbor. Hal 38-39

⁴K. Purdam, 'The Impacts of Democracy on Identity: Muslim Councillors and their Experiences of Local politics in Britain', Ph.D. thesis, University of Manchester, 1997, p. 127. Disitasi dalam Ansari, Humayun (2002). *Muslim in Britain*. UK, Minority Rights Group International.

⁵K. Purdam, 'The Impacts of Democracy on Identity: Muslim Councillors and their Experiences of Local politics in Britain', Ph.D. thesis, University of Manchester, 1997, p. 125. Disitasi dalam Ansari, Humayun (2002). *Muslim in Britain*. UK, Minority Rights Group International.

2. Pengaruh fenomena *self exclusion* dalam membentuk artikulasi tuntutan

Menurut Hersi, *self exclusion* adalah salah satu dari dua sebab terjadinya *financial exclusion* atau keengganan maupun ketidakmampuan kelompok-kelompok tertentu untuk mengakses layanan finansial utama dalam suatu daerah atau Negara.⁶ *Self exclusion* pada dasarnya adalah sebab pertama dari *financial exclusion* yaitu keengganan personal untuk mengakses layanan finansial di sebuah negara karena perbedaan kepercayaan. Dalam kasus ini, Masyarakat Muslim di United Kingdom telah mengalami *financial exclusion* sebelum diijinkannya operasional Perbankan Islam di United Kingdom karena dianggap melanggar Syariat Islam.

Salah satu fungsi bank yang paling dasar adalah menjadi lembaga penyedia modal dan layanan finansial bagi masyarakat yang membutuhkan. Namun bagi Masyarakat Muslim, terlebih yang tinggal di Negara Non Muslim seperti United Kingdom, mengakses layanan perbankan konvensional yang berbasis *interest* (bunga) dapat menjadi sebuah dosa sehingga menjadi dilema berkelanjutan. Dengan alasan tersebut, layanan perbankan konvensional tidak akan pernah menjadi jalan keluar paling efektif untuk menanggulangi *financial exclusion* dalam kasus Masyarakat

⁶ Warsame, Mohamed, Hersi (2009) *The role of Islamic finance in tackling financial exclusion in the UK*. Doctoral thesis, Durham University. Hal 21 - 22

Muslim sebanyak apapun dibangun dan dikembangkan sebelum didirikan sebuah layanan finansial dan perbankan yang berbasis syariah⁷.

Jika ditinjau melalui penjelasan Easton mengenai konversi sebuah tuntutan menjadi sebuah isu yang dapat dipertimbangkan untuk ditangani secara politis, maka fenomena *self exclusion* ini mempunyai andil bagi terbentuknya sebuah artikulasi spesifik dari Masyarakat Muslim terkait bagaimana seharusnya Pemerintah menangani masalah *financial exclusion* yang melanda Masyarakat Muslim di United Kingdom. Fenomena *self exclusion* yang disebabkan oleh perbedaan prinsip antara Masyarakat Muslim yang percaya dengan sistem ekonomi dan perbankan Islam dan sistem perbankan konvensional memberikan sebuah sugesti bahwa untuk menanggulangi *exclusion* tersebut, Pemerintah perlu untuk mewujudkan sebuah sistem perbankan yang dapat mengakomodir prinsip Masyarakat Muslim. Secara spesifik, sugesti tersebut mengarah kepada perijinan Perbankan Islam untuk beroperasi secara penuh di United Kingdom.

Melalui pendirian Perbankan Islam, Masyarakat Muslim diharapkan dapat memanfaatkan modal yang dapat diperoleh untuk membuka bisnis, dan mencari pekerjaan sehingga membantu mengentaskan Masyarakat Muslim dari *financial exclusion* dan lebih jauh lagi, membantu perekonomian negara.

⁷Ibid Hal 87 – 88

3. Pengaruh lobi *Muslim Council of Britain* sebagai *interest group*

Masyarakat Muslim

Berdasarkan deskripsi dalam situsnya, *Muslim Council of Britain* adalah sebuah organisasi independen yang berafiliasi dengan lebih dari 500 organisasi regional dan nasional termasuk masjid-masjid dan sekolah-sekolah, didirikan untuk melayani kerjasama, konsultasi dan koordinasi urusan Muslim di United Kingdom.⁸

Sebagai organisasi yang dibangun atas kerjasama dan koordinasi antar lembaga-lembaga Muslim dan seluruh individu Muslim yang berada di United Kingdom, *Muslim Council of Britain* adalah sebuah organisasi penyedia jalur-jalur politik bagi artikulasi kepentingan Masyarakat Muslim. Dalam hal ini, termasuk juga kepentingan Masyarakat Muslim akan tersedianya Perbankan Islam di United Kingdom.

Aktivitas artikulasi kepentingan terkait Perbankan Islam di United Kingdom oleh *Muslim Council of Britain* pada dasarnya telah dimulai sejak munculnya *Dallah Al-Baraka* sebagai salah satu inisiator lembaga investasi di United Kingdom yang menyediakan produk Perbankan Islam pada akhir tahun 1980an. Aktivitas tersebut pada dasarnya adalah sebuah usaha untuk mengartikulasikan kepentingan Masyarakat Muslim untuk keluar dari jeratan *financial exclusion*. Karenanya, walaupun *Al-Baraka* ditutup selang beberapa tahun setelah berdirinya, kegiatan untuk mempromosikan Perbankan Islam di United Kingdom sebagai usaha menanggulangi

⁸ <http://www.mcb.org.uk/about-mcb/> diakses 1 september 2016

financial exclusion yang menimpa Masyarakat Muslim masih gencar dilakukan oleh *Muslim Council of Britain*. Hal tersebut sesuai dengan sebuah publikasi yang berada di situsnya yang menyatakan bahwa salah satu dilema yang dihadapi masyarakat muslim sejak dulu adalah kredit pembelian property – dengan menggunakan sistem bunga – yang diharamkan dalam agama, sementara jika harus membayar secara *cash* dimuka akan sangat memberatkan karena harga property di United Kingdom yang cenderung tinggi dan tingkat ekonomi rata – rata masyarakat muslim tidak dapat menjangkaunya.⁹

Selain daripada usaha artikulasi melalui media elektronik, *Muslim Council of Britain* juga melakukan *lobbying* dalam tubuh pemerintahan. Menurut Chase, praktek *lobbying* yang terjadi dalam kasus perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom adalah praktek yang *bottom-up*.¹⁰ Kepentingan dari Masyarakat Muslim akan berdirinya Perbankan Islam di United Kingdom diinterpretasikan ulang oleh *Muslim Council of Britain* dan diartikulasikan secara lebih spesifik dan mendetail kepada badan pemerintahan yang berwenang.

Dalam melakukan usaha artikulasi kepentingan Masyarakat Muslim akan Perbankan Islam, *Muslim Council of Britain* tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng beberapa *interest group* yang mewakili institusi perbankan swasta dan yang mempunyai produk layanan Perbankan Islam

⁹The Muslim Council of Britain, 'Britain gives the green light to Islamic Banking' (25 August 2004) <http://mcb.org.uk/features/features.php?ann_id=449>

¹⁰ Chase, Anthony (2012). *Divergent Political Dynamics of Islamic Banking in Britain and France*. Thesis, The Department of Political Science, University of Michigan – Ann Harbor. Hal 51

seperti *Ansar Finance Group (AFG)*. Hingga tahun 2004, *Muslim Council of Britain* telah menggandeng beberapa kelompok kerja pemerintah untuk merumuskan reformasi hukum yang legal bagi terwujudnya Perbankan Islam dan bahkan telah menerbitkan materi pendidikan tentang keuangan Islam bagi masyarakat non-Muslim. Disisi lain, *Ansar Finance Group (AFG)*, sebuah lembaga perdagangan dan Perbankan Islam yang bermarkas di Manchester, juga telah gencar membantu melobi dan menjadi perantara antara Masyarakat Muslim dan bankir Islam.¹¹

Pasca kegiatan tersebut, terdapat peningkatan ketertarikan terhadap isu Perbankan Islam dari pihak Masyarakat Muslim maupun dari pihak non-Muslim dan institusi keuangan konvensional. Dilain pihak, *HM Treasury*, *Financial Service Authority (FSA)* dan *Bank of England (BoE)* juga telah memunculkan indikasi untuk membahas isu tersebut dengan membentuk sebuah kelompok kerja bersama dengan *Muslim Council of Britain* dan institusi-institusi yang lain.¹²

Kelompok kerja tersebut mencapai titik keberhasilannya pada tahun 2003 ketika Sir Howard Davies, Chairman *FSA*, mengutarakan dukungannya dalam sebuah konferensi seputar Keuangan dan Perbankan Islam di Bahrain. Inti dari pidatonya adalah bahwasanya tidak ada keberatan maupun sanggahan dalam ide beroperasinya Perbankan Islam di United Kingdom jika Perbankan Islam terbukti mampu memenuhi persyaratan

¹¹ Ibid hal 52

¹² Ibid

regulasi oleh *Financial Service Authority*. Menurutnya, United Kingdom mempunyai kepentingan yang jelas untuk memastikan Perbankan Islam dapat tumbuh subur didalamnya.¹³

B. Surplus Likuiditas negara-negara Timur Tengah

Dukungan menurut Easton adalah energi berupa tindakan maupun orientasi yang dapat meningkatkan atau menghambat kinerja suatu Sistem Politik. Dukungan dapat berbentuk tindakan maupun orientasi dari internal maupun eksternal Sistem Politik. Berdasarkan data yang telah penulis kumpulkan, dukungan yang paling berpengaruh bagi berdirinya Perbankan Islam di United Kingdom berupa tindakan yang berasal dari luar Sistem Politik, yaitu surplus likuiditas di Timur Tengah.

Dalam dekade belakangan ini, kenaikan harga minyak telah mengakibatkan peningkatan pendapatan Negara – Negara eksportir dengan pesat. Sejak *oil boom* tahun 1979, para eksportir minyak telah mengalami peningkatan pendapatan yang drastis, ditahun 2002 hingga tahun 2006 keuntungan bahkan diklaim lebih dari 650 miliar US\$. Dengan pemasukan sebanyak itu, diperlukan penanganan yang juga intensif dan hati – hati terhadap likuiditasnya. Jika terlalu banyak diputar di Negara sendiri dengan kurs lokal, berpotensi membuat kurs mata uang lokal menjadi turun. Sama halnya jika hanya disimpan. Salah satu cara terbaik menangani surplus

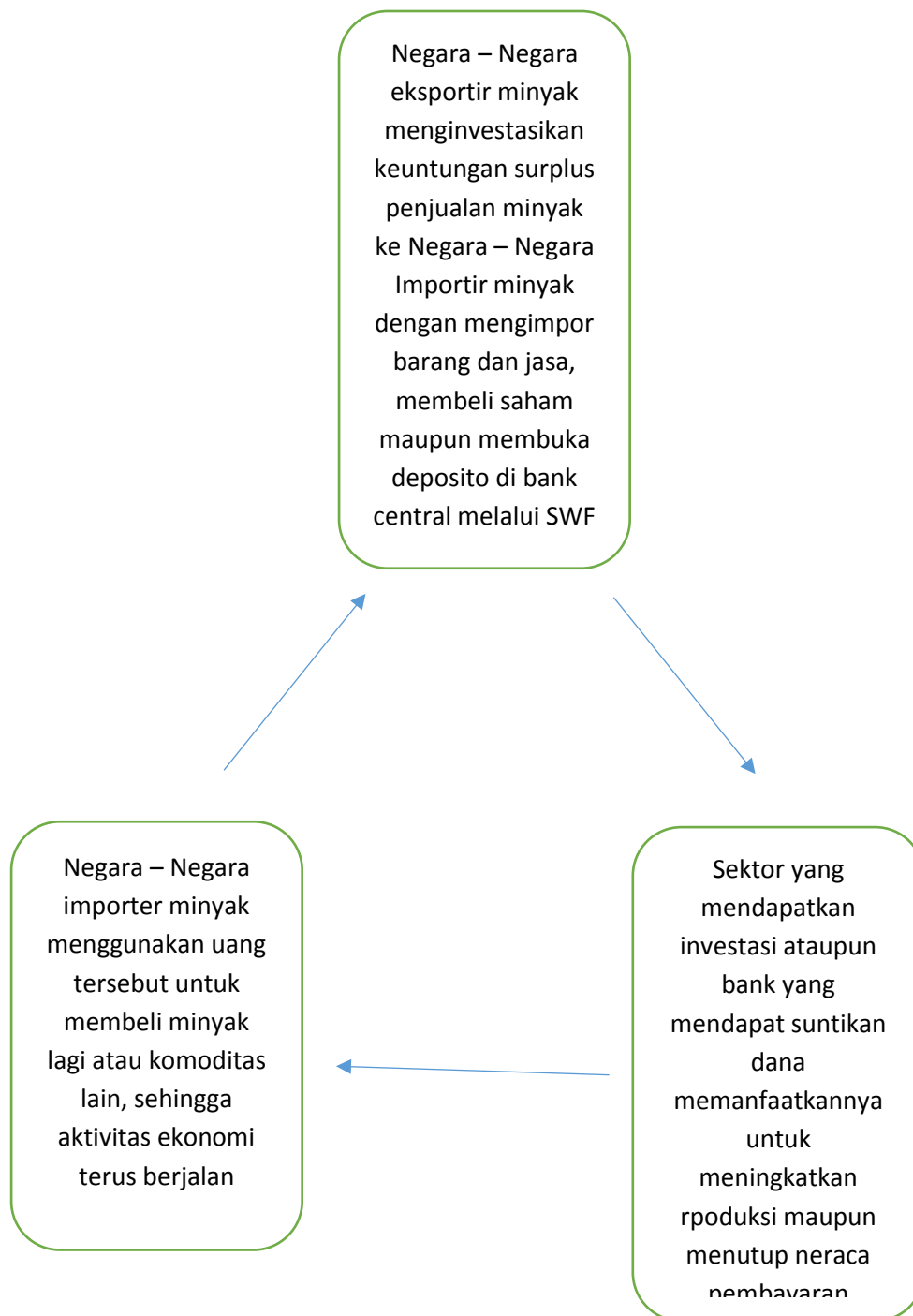
¹³ Asmat, Shafaq (2014). *Islamic Finance in the Western World: Development, Legal Regulation and Challenges Faced by Islamic Finance in the United Kingdom*. Journal of Islamic Banking and Finance hal 99

keuntungan ini adalah dengan melakukan *petrodollar recycling*. Beberapa opsi yang dapat dilakukan oleh Negara – Negara eksportir minyak dalam usahanya untuk memutar modalnya dipasar internasional (*petrodollar recycling*) adalah dengan impor barang dan jasa, investasi seperti SWF (*Sovereign Wealth Fund*) atau FDI (*Foreign Direct Investment*), membuka deposito ataupun membeli aset asing di pasar modal Internasional¹⁴.

Dalam prakteknya, harga minyak yang tinggi akan membuat daya beli Negara – Negara pengimpor minyak turun, sehingga arus pemasukan penjualan minyak bagi Negara – Negara eksportir minyak akan terancam berkurang. Namun jika Negara – Negara eksportir minyak menggunakan pemasukan tersebut untuk mengimpor barang ataupun jasa dari Negara – Negara importer minyak, berinvestasi maupun membuka deposito dan mengisi kembali devisa mereka, maka hal tersebut dapat meningkatkan kembali daya beli Negara – Negara importer minyak sehingga dapat mengurangi efek melonjaknya harga minyak¹⁵. Berikut adalah ilustrasinya

¹⁴ Priambodo, Yanuar (2012). *Kepentingan Ekonomi Politik Inggris dalam Menerapkan Sistem Ekonomi dan Keuangan Islam (2004-2010)*. Skripsi FISIP Universitas Indonesia hal. 54

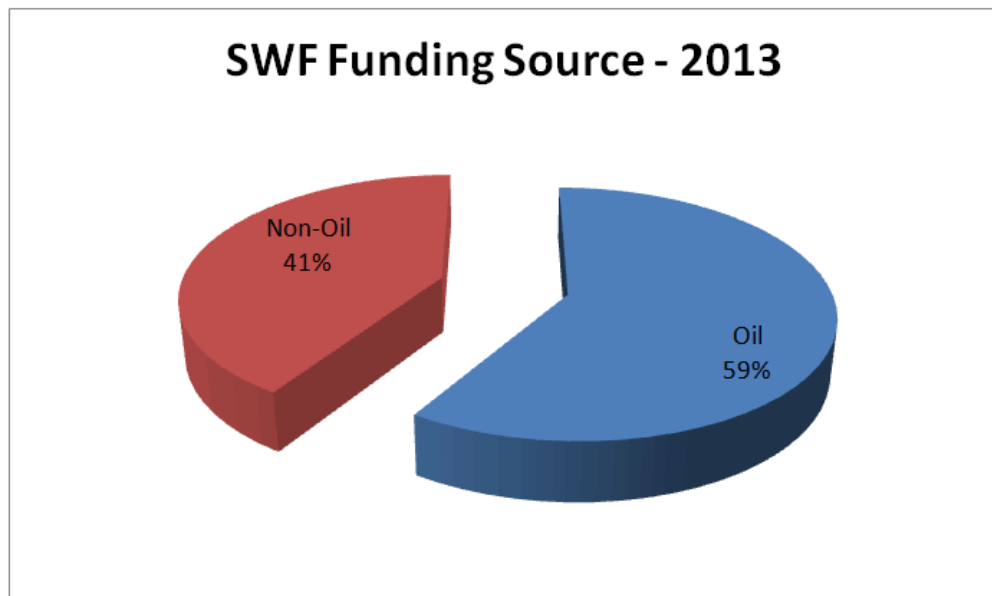
¹⁵ Ibid. hal 55



Gambar 1 Proses Petrodollar Recycling

Sumber : berbagai macam sumber

Tren aktivitas tersebut kemudian segera dianggap sebagai sebuah kesempatan emas bagi banyak lembaga – lembaga perbankan di Negara – Negara importer minyak, termasuk United Kingdom. London, sebagai salah satu pasar internasional terbesar di dunia, tidak dapat menya – nyiakan kesempatan ini. Pada kenyataannya, petrodollar, terlebih yang berbentuk SWF menjadi ‘kacang goreng’ favorit dalam lingkup keuangan internasional hingga saat ini. Satu dekade terakhir, tingkat transaksi SWF secara menyeluruh naik hingga hampir 90% dari US\$3.259 trilyun ke US\$6.106 trilyun dengan 59% berasal dari penjualan minyak dan 41% non minyak. Berdasarkan regional Negara – Negara pemegang SWF terbesar

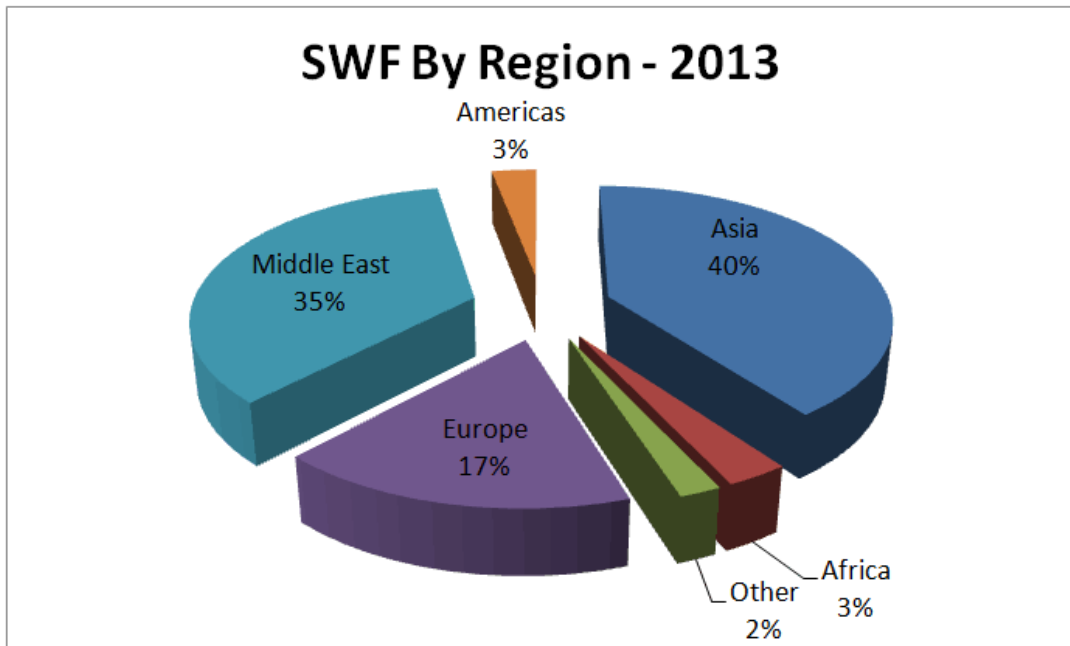


Source : SWF Institute

Gambar 2 Sumber Dana SWF (2013)

Sumber : marketoracle, 2014

adalah Asia dan Timur Tengah.



Source : SWF Institute

Gambar 4 Sumber SWF Menurut Wilayah

Sumber : marketoracle, 2014

SWF – by Fund Size 2013

Ranking	Country	SWF Name	Asset \$b	Inception	Origin	Linaberg [Ⓜ]
1	Norway	Govt. Pension Fund	818	1990	Oil	10
2	UAE-Abu Dhabi	Abu Dhabi Invnt. Auth	773	1976	Oil	5
3	Saudi Arabia	SAMA	675.9	n/a	Oil	4
4	China	China Investment Corp	575.2	2007	non-Oil	7
5	China	SAFE Investment Corp	567.9	1997	non-Oil	4
6	Kuwait	Kuwait Investment Auth	410	1953	Oil	6
7	China-HongKong	HK Monetary Authority	326.7	1993	non-Oil	8
8	Singapore	SGIC	285	1981	non-Oil	6
9	Singapore	Temasek Holdings	173.3	1974	non-Oil	10
10	Qatar	Qatar Investment Auth	170	2005	Oil	5
25	Malaysia	Khazanah Nasional	40.5	1993	non-Oil	5

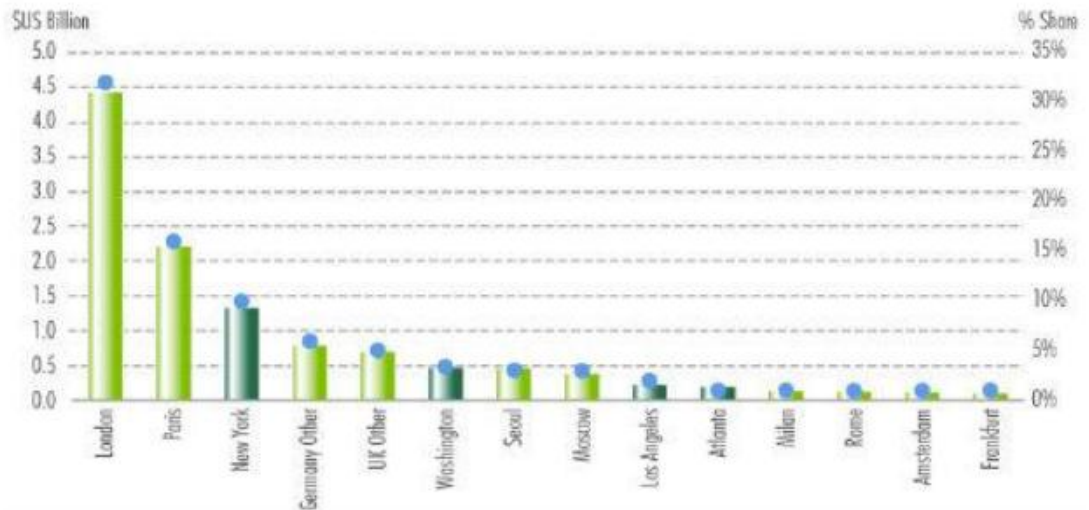
[Ⓜ] - [Linaberg-Maduell](#) Transparency Index

Source : SWF Institute

Gambar 3 Peringkat Sumber Dana SWF

Sumber : marketoracle, 2014

Top Investment Hotspots for Middle Eastern Capital



Gambar 5 Peringkat Negara – Negara Sasaran Dana SWF

Source : world property journal, 2015

Faktanya, jika kita melihat 3 gambar pertama diatas, Negara – Negara eksportir minyak memang mempunyai kontribusi yang besar terhadap ketersediaan likuiditas dalam ranah ekonomi global, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 1 dan 2. Jika melihat ke gambar 3, terdapat 4 Negara Timur Tengah yang masuk kedalam 10 besar penyedia SWF terbesar disusul dengan Asia sebanyak 3 Negara dan Eropa sebanyak 1 Negara. Faktanya, sebagian besar dari perusahaan yang masuk dalam list SWF terbesar tersebut seperti *Abu Dhabi Investment Authority*, *Kuwait Investment Authority* dan *Temasek Singapore* mempunyai kantor perwakilan di United Kingdom. Tidak cukup dengan hal itu, jika kita melihat gambar ke 4 terpampang jelas bahwa sampai tahun 2015 United

Kingdom (London) masih menjadi destinasi favorit bagi para investor SWF. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pada akhirnya, selain karena reputasi London sebagai pasar internasional yang kredibilitasnya teruji, strategi pendirian perbankan Islam ikut menambah daya tarik dalam menangkap arus SWF ke United Kingdom.

Namun terlepas daripada itu, terdapat kendala yang memberatkan bagi Negara-Negara eksportir minyak – yang mana sebagian besar adalah Negara Muslim di Timur Tengah – berupa sistem finansial dan perbankan konvensional Negara – Negara Barat yang berbasis bunga¹⁶.Kendala tersebut pada kenyataannya tidak hanya berlaku bagi Negara – Negara Barat pengimpor minyak saja, namun juga berlaku bagi Negara – Negara pengimpor minyak non Barat yang sistem perbankan dan keuangannya masih konvensional dan tidak menyediakan alternatif Perbankan Islam. Hal itu dilain kesempatan mengakibatkan Perbankan Islam yang lebih dulu *booming* di beberapa Negara belahan tenggara dan selatan Asia seperti Malaysia, Indonesia, Bangladesh maupun India dilirik oleh Negara – Negara eksportir minyak untuk kegiatan *petrodollar recycling*. Berdasarkan pertemuan kepentingan dan itikad untuk menghapus kendala dalam pertemuan kepentingan tersebut serta kepentingan untuk memenangkan persaingan menangkap arus modal yang deras dari Negara – Negara eksportir minyak tersebut, institusi finansial Islam mendapatkan celahnya

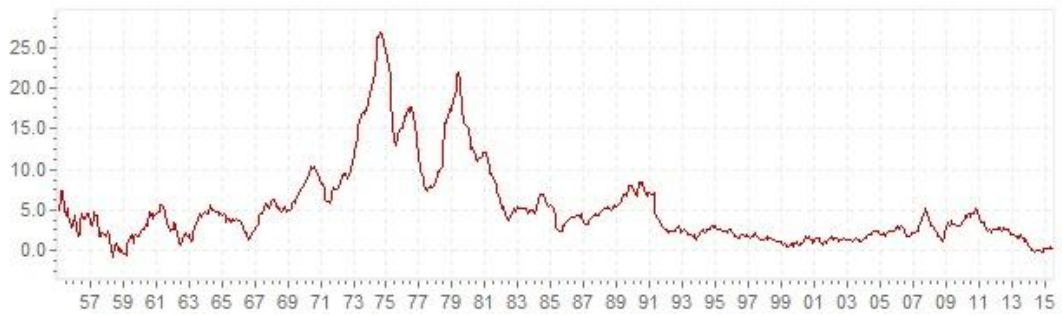
¹⁶Aldohni, Abdul Karim (2008). *The Emergence of Islamic Banking in the UK: A Comparative Study with Muslim Countries*. Arab Law Quarterly, BRILL. Hal. 194

untuk masuk dan kesempatannya untuk dipertimbangkan di Negara – Negara Barat. Satu pihak mendambakan kestabilan dan pihak lainnya mengejar keuntungan.

Jika ditinjau melalui definisi dukungan menurut Easton, maka fenomena surplus likuiditas di Timur Tengah maupun di negara-negara eksportir minyak mempunyai dua implikasi yang dapat menjadi dukungan bagi keluarnya kebijakan perijinan operasional Perbankan Islam di United Kingdom.

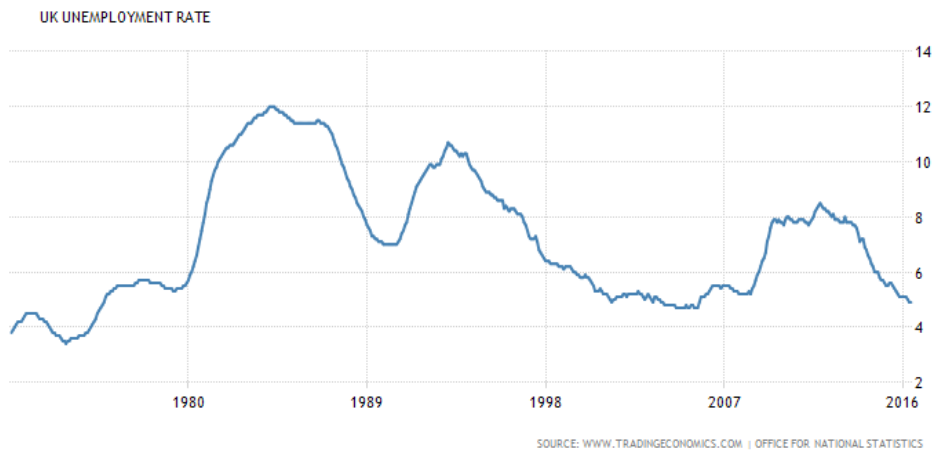
Pertama, adalah *preferensi* para investor untuk bertransaksi dalam bingkai Perbankan Islam yang mana belum ada di United Kingdom. Hal tersebut jika dibiarkan dapat mengakibatkan United Kingdom kehilangan kesempatan untuk menangkap arus likuiditas tersebut sehingga di kemudian hari memunculkan urgensi untuk mengizinkan operasional Perbankan Islam.

Kedua, adalah masuknya surplus likuiditas dan investasi tersebut kedalam kas negara. Masuknya aliran investasi yang besar tersebut dapat membantu memperbaiki keadaan perekonomian United Kingdom yang sedang lesu dan mendorong kinerja Perbankan Islam yang baru berdiri. Meningkatnya kinerja Perbankan Islam tersebut disisi lain dapat mendorong Masyarakat, khususnya Muslim, untuk bekerja dan mengembangkan usahanya sehingga selain dapat membantu menjaga stabilitas inflasi, juga dapat membantu menurunkan tingkat pengangguran yang ada di United Kingdom seperti grafik dibawah ini.



Gambar 6 Tingkat inflasi United Kingdom (1957 - 2015)

Sumber : Inflation.eu



Gambar 7 Tingkat Pengangguran di United Kingdom (1971 – 2016)

Sumber : tradingeconomics.com